



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 12 September 2023
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Penyesuaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 24 (dua puluh empat) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP C. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dengan agenda penyesuaian RKA K/L Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024, hari Selasa, 12 September 2024, dibuka pukul 11.28 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dengan agenda penyesuaian RKA K/L Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Menteri Dalam Negeri RI menyampaikan Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2024 sebesar **Rp3.320.804.560.000,- (tiga trilyun tiga ratus dua puluh milyar delapan ratus empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)**, termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar **Rp67.381.500.000,- (enam puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)**, dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar **Rp26.967.272.000,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)**. Dengan demikian pagu alokasi anggaran Kemendagri tahun 2024 menjadi sebesar **Rp3.347.771.832.000,- (tiga trilyun tiga ratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)**, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
 - a. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum sebesar Rp157.353.190.000,-
 - b. Program Tata Kelola Kependudukan sebesar Rp691.283.486.000,-
 - c. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa sebesar Rp396.337.065.000,-
 - d. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2.102.798.091.000,-
2. Menteri Dalam Negeri RI menyampaikan usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemendagri sebesar **Rp770.779.139.000,- (tujuh ratus tujuh puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)** dan usulan tambahan anggaran DKPP sebesar **Rp22.621.720.000,- (dua puluh dua milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)**.
3. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyampaikan Pagu Anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar **Rp231.300.651.000,- (dua ratus tiga puluh satu milyar tiga ratus juta senam ratus lima puluh satu ribu rupiah)**, dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar **Rp1.273.658.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)**.

Dengan demikian pagu alokasi anggaran BNPP tahun 2024 menjadi sebesar **Rp232.574.309.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu rupiah)**, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :

- a. Program Dukungan Manajemen: Rp219.969.835.000,-
- b. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan: Rp12.604.474.000,-

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dengan agenda penyesuaian RKA K/L Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2024 sebesar **Rp3.320.804.560.000,- (tiga trilyun tiga ratus dua puluh milyar delapan ratus empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)**, termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar **Rp67.381.500.000,- (enam puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)**, dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar **Rp26.967.272.000,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)**. Dengan demikian pagu alokasi anggaran Kemendagri tahun 2024 menjadi sebesar **Rp3.347.771.832.000,- (tiga trilyun tiga ratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)**, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
 - a. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum sebesar Rp157.353.190.000,-
 - b. Program Tata Kelola Kependudukan sebesar Rp691.283.486.000,-
 - c. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa sebesar Rp396.337.065.000,-
 - d. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2.102.798.091.000,-
2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemendagri sebesar **Rp770.779.139.000,- (tujuh ratus tujuh puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)** dan usulan tambahan anggaran DKPP sebesar **Rp22.621.720.000,- (dua puluh dua milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)**, dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan

anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kemendagri tahun 2024 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.

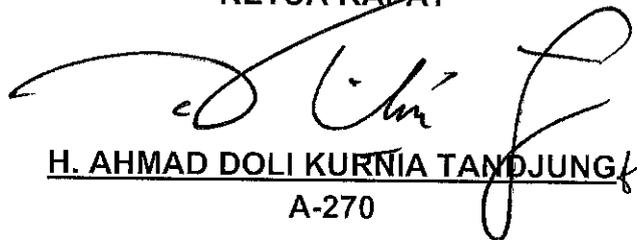
3. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar **Rp231.300.651.000,- (dua ratus tiga puluh satu milyar tiga ratus juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)**, dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar **Rp1.273.658.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)**. Dengan demikian pagu alokasi anggaran BNPP tahun 2024 menjadi sebesar **Rp232.574.309.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu rupiah)**, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
 - a. Program Dukungan Manajemen: Rp219.969.835.000,-
 - b. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan: Rp12.604.474.000,-

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.27 WIB.

Jakarta, 12 September 2023.

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270